

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Makassar: Kencana, 2016)
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, cetakan ke 2, 2022)
- Asshiddiqie, Jimly, *Kepastian Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018).
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Bernard L. Tanya Yoann. Simanjuntak, Markus Y.Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).
- Cooter, Robert, *Law and Economics*, (colorado: Westview Press, Edisi 5, 2014)
- H.L.A. Hart, *Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1961)
- Harkunti P. Rahayu, juarni anita, *Perencanaan Evakuasi Sementara (TES)* Tsunami, (Jakarta: BNPB, 2013)
- Joesoef, Iwan Erar dan Yuliana Yuli, *Model-Model Kontrak Pemerintah*, (Jakarta: LPPM UPN Veteran Jakarta, 2022).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Kepastian Hukum dalam Tata Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)
- Puang, Victorianus M. H. Randa, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Pratiwi, E , *persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam Hukum Tata Ruang Indonesia.*( Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2017)
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, cetakan 6, 1991)
- Suharnoko, S, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan Putusan-putusan Mahkamah Agung*. (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

## **Jurnal**

- Amin, Subhan, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 8, No. 1, 2019).
- Asmara, Teguh Tresna Puja, dkk, *Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum*, (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 1, 2020).
- Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, *Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*, (Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9, No. 1, 2022).
- Erni dan Febri Jaya, *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, (Jurnal Wajah Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022).
- Fadilah, Anis Nur dan Indah Prabawati, *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Nganjuk*, (Jurnal Publika, Vol. 7, No. 4, 2019).
- Gunardi, *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Jurnal ERA HUKUM Ilmiah Ilmu Hukum, No. 1, Th. 13, 2005).
- Hudiata, Edi, *Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No 2, 2017).
- Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, (Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 3, 2019).

## **Makalah/Tesis/Disertasi**

- Agus brotosusilo, “*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguards*” (Ringkasan Desertasi Doktor Universitas Indonesia)
- Budiartha, I Nyoman Putu, *Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Disertasi).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

### **Internet/Sumber Lainnya.**

Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, *Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*, (Presentasi Power Point).

Merdeka.com, *Nawacita adalah 9 Agenda Prioritas Pemerintah Jokowi-JK, Ini Penjelasannya*, (diakses pada tanggal 28 Februari 2023).